



Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dea Tunjungsari^{1*}, Rifki Khoirudin²

deatunjung@gmail.com^{1*}, rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan

^{1,2}Universitas Ahmad Dahlan

Received: 23 01 2022. Revised: 11 02 2022. Accepted: 21 02 2022.

Abstract : This research was conducted to determine the effect of Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Population Amounts on Capital Expenditures in the Special Province of Yogyakarta in 2011-2017. Law No. 22 of 1999 concerning Regional Government is a juridical basis for regional economic development in Indonesia. The locations in this study are districts and cities in the Special Province of Yogyakarta. Capital expenditure is an output that greatly affects development. Because capital expenditure is a fixed asset and has long-term benefits, it makes capital expenditure a reference for improving development and increasing people's purchasing power. Research data in the form of secondary data. The results of the study show that Regional Original Income and Population Influence on Capital Expenditures in the Special Province of Yogyakarta. While the General Allocation Fund and Special Allocation Funds have no effect on Capital Expenditures in the Special Province of Yogyakarta.

Keywords : Capital expenditures, Local revenue, Population amounts

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah mengetahui variabel yang mempengaruhi belanja modal. Variabel tersebut berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Jumlah Penduduk. Adapun fokus lokasi penelitian ini dilakukan di DIY tahun 2011-2017. Belanja modal merupakan aset tetap yang memiliki nilai serta manfaat jangka panjang dan merupakan output yang sangat mempengaruhi pembangunan. Belanja modal digunakan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pembangunan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana data skunder diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). Hasilnya menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi belanja modal adalah PAD dan Jumlah Penduduk, sedangkan belanja modal tidak dipengaruhi oleh variabel DAU dan DAK.

Kata Kunci: Belanja modal, Pendapatan asli daerah, Jumlah penduduk

PENDAHULUAN

Di zaman pembaharuan, pemerintahan melaksanakan perubahan-perubahan pokok serta mendasar, dengan tujuan memperbaiki kelemahan maupun kekurangan dan melakukan upaya mengakomodasikan berbagai tuntutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang

semakin berkembang, antara lain ditetapkannya pemerintahan yang demokratis dan pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi untuk masing-masing daerah yang digunakan untuk mengelola serta mengatur pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat serta peraturan perundang-undangan yang ada. Otonomi tersebut berasal dari Pemerintah Pusat kemudian diberikan kepada masing-masing daerah agar dilaksanakan secara luas, nyata, bertanggung jawab, dan berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Dalam era otonomi daerah tersebut, peran Belanja Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian, karena Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam melakukannya. Jika Belanja Modal digunakan secara efektif dan efisien serta menghasilkan manfaat yang tertinggi, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Penjelasan tentang otonomi daerah tercantum dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Penjelasan tersebut berisi landasan yudiris bagi penembangan ekonomi daerah di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya dijelaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, potensi daerah dan keanekaragaman daerah dalam pelaksanaan pengembangan otonomi di daerah kabupaten dan kota harus diperhatikan. Dalam era otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah akan lebih besar, sehingga diharapkan daerah dapat mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Bagi daerah yang mempunyai potensi pendapatan yang besar, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang positif, akan tetapi disisi lain bagi daerah yang masih relatif kecil pendapatannya akan dituntut untuk lebih mandiri (RI, 1999).

Salah satu cara pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan dengan pembangunan daerah. Adanya hal tersebut diarahkan untuk membangun di seluruh bidang dan sektor yang merupakan perwujudan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 (Republik Indonesia, 1945) terutama dalam memenuhi hak masyarakat. Tujuan dari pengembangan otonomi daerah diantaranya yaitu untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kreativitas, meningkatkan keikutsertaan warga, dan meningkatkan adanya peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara pada (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010) dijelaskan mengenai belanja modal. Manfaat anggaran belanja modal pemerintah dijelaskan secara rinci, dimana manfaat lebih dari satu tahun anggaran dapat meningkatkan kekayaan ataupun aset daerah dan dapat meningkatkan belanja yang bersifat rutin. Selain itu belanja modal dapat digunakan untuk infrastruktur, perlengkapan, serta aset tetap.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai belanja modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih tergolong rendah, dimana belanja modal untuk provinsi di Pulau Jawa sudah tergolong tinggi (Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Adapun penelitian ini dilakukan dari tahun 2011-2017 dikarenakan data sebelum tahun 2011 belum tersedia dan data tahun 2018 belum tersedia. Hasil penelitian serupa yang dilakukan masih menghasilkan hasil beragam. Penelitian yang dilakukan (Pelealu, 2013) di pemerintah Kota Manado menerangkan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh PAD dan DAK dengan hasil positif dan signifikan. Penelitian (Devita, *et.al*, 2014) menghasilkan temuan yang sama, dimana PAD dan DAU memiliki hubungan signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Penelitian (Askam, 2008) memiliki hasil yang sama, alokasi belanja modal pemerintah dipengaruhi secara positif oleh PAD, DAU dan DAK. Penelitian tersebut dilakukan pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Sementara pada penelitian (Juniawan & Suryantini, 2018), melakukan pengujian yang sama pengaruh PAD, DAU dan DAK, menghasilkan hubungan positif untuk alokasi belanja modal di Provinsi Bali. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian dari (Juniawan & Suryantini, 2018), mereka melakukan penelitian di Aceh mengenai hubungan PAD dan DAU terhadap belanja modal. Hasil menunjukkan bahwa adanya hubungan positif PAD, sementara DAU memiliki hubungan negatif dengan belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil antara penelitian (Adyatma & Oktaviani, 2015).

Belanja modal termasuk belanja langsung yang dipakai dengan tujuan pembiayaan yang menambah aset atau investasi (Mardiasmo, 2018). Lebih lanjut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan, bahwa belanja modal yaitu golongan belanja langsung yang dipakai dalam pembiayaan investasi (menambah aset). Sedangkan menurut (Halim & Kusufi, 2017) belanja modal adalah penggunaan anggaran belanja guna memperoleh harta tetap serta harta lainnya, dimana harta tersebut memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Boediono, 1999) menjelaskan bahwa pemakaian anggaran dilakukan untuk membeli, mengadakan atau membangun harta tetap berwujud dimana pemakaian anggaran yang dipakai dalam kegiatan pemerintahan yang nilai dan manfaatnya dapat digunakan dalam jangka waktu lebih besar dari satu tahun merupakan belanja modal.

Belanja modal tidak hanya pemakaian dalam rangka pembelian aset atau inventaris, tetapi juga pemakaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk biaya pemeliharaan dengan sifat menambah dan mempertahankan masa manfaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset. Dalam hal pemanfaatan Belanja Modal, akan sangat penting memperhatikan

dari kegiatan perencanaan dalam Belanja Modal, karena agar supaya tidak terjadi inefisiensi anggaran, dan ketidaktepatan dalam belanja barang tersebut. Untuk itu sebaiknya sebelum dilakukan kegiatan tersebut, diharapkan ada perencanaan yang matang, sehingga manfaatnya dapat memberikan multiplier efek yang besar dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menunjang kemandirian daerah tersebut yang pada akhirnya diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut meningkat.

Hasil dari penerimaan ekonomi asli daerah adalah PAD (Halim & Kusufi, 2017). Sumber penerimaan daerah termasuk salah satu aspek yang berpengaruh dalam belanja modal merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya PAD tersebut dapat digunakan sesuai potensi yang ada di daerah. Sementara menurut (Boediono, 1999), penerimaan daerah yang diperoleh sesuai dengan peraturan daerah adalah PAD. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD bersumber dari potensi daerah yang kemudian dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah.

Menurut (Dinar & Hasan, 2018), dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BN), selanjutnya diberikan kepada daerah dalam bentuk *block grant*, yang pemakaiannya digunakan daerah disebut Dana Alokasi Umum (DAU). Lebih jauh dijelaskan tentang tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh (Mardiasmo, 2018). Terdapat ketimpangan keuangan, yaitu antara pusat dan daerah, oleh karenanya tujuan DAU adalah menjaga pemerataan dan keseimbangan keuangan, sehingga ketika pembagian Dana Alokasi Umum perlu mempertimbangkan potensi daerah yang dimiliki, serta memperhatikan pembiayaan dalam mendukung kegiatan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Selain itu DAU memiliki fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal.

Selain bersumber dari DAK, belanja modal pemerintah daerah juga diperoleh dari DAU, akan tetapi dana tersebut berasal dari pemerintah pusat. Adapun faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum setiap daerah adalah celah fiskal (*fiscal gap*) serta potensi daerah (*fiscal capacity*). Adapun prinsip pengalokasian dana DAU yaitu dengan memperhatikan potensi daerah. Daerah yang berpotensi fiskal tinggi namun kebutuhannya rendah akan mendapatkan Dana Alokasi Umum cenderung sedikit. Daerah akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum cenderung tinggi jika potensi daerah rendah namun kebutuhannya tinggi.

APBN yang digunakan untuk Pemerintah kabupaten/ kota guna pembiayaan terhadap kebutuhan tertentu yang memiliki sifat khusus, sesuai ketersediaan dana APBN diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) (M. Suparmoko, 2002). Tujuan dari pengalokasian Dana

Alokasi Khusus adalah untuk membantu dalam pembiayaan yang dibutuhkan atas suatu kegiatan yang termasuk bagian dari urusan daerah dengan prioritas nasional, terutama biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat mengenai sarana dan prasarana yang belum memenuhi kriteria atau guna mempercepat pembangunan daerah (Boediono, 1999). Adapun kriteria yang harus dicapai dalam memperoleh DAK yaitu, daerah wajib memiliki kriteria umum, khusus dan teknis.

Semua orang yang berada dan tinggal di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih disebut penduduk. Sedangkan Pertumbuhan penduduk adalah kondisi perkembangan yang mengalami peningkatan serta penurunan jumlah penduduk. Untuk sistem pencatatan kependudukan yang ada saat ini, kecil kemungkinan bagi penduduk akan tercatat pada lebih dari satu daerah. Hal ini dikarenakan kemajuan system informasi di bidang kependudukan dan adanya KTP elektronik yang digunakan sekarang, sehingga jumlah penduduk akan lebih dapat dipercaya. Indonesia kedepannya diperkirakan akan mengalami ledakan jumlah penduduk yang akan lebih baik diantisipasi supaya tidak menimbulkan efek negatif.

Migrasi berkembang dikarenakan pendapatan yang berbeda di perdesaan dan perkotaan (Todaro, 2008). Dalam pembangunan ekonomi, faktor yang terpenting adalah sumber daya manusia. Penggunaan secara tepat sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pengendalian berkembangnya penduduk serta mampu dimanfaatkan dengan baik jika jumlah penduduk mampu diatasi serta dikurangi. Menurut (Boediono, 2014) menyatakan bahwa penduduk yang meningkat dapat memperbanyak jumlah tenaga kerja yang mampu menambah produksi, jika pertumbuhan diiringi dengan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja. Peningkatan produksi dapat lebih cepat daripada peningkatan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat kuantitatif, dengan sumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Data yang diperoleh berupa Laporan Realisasi APBD yang memuat data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan untuk jumlah penduduk didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada metode *common effect model* (CEM) menggunakan model estimasi dalam regresi data

panel metode ini juga disebut dengan *Pooled Least Square*. *Ordinary Least Square* atau kuadrat terkecil masih digunakan dalam model *common effect*. Variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen, apabila *p-value* kurang dari batas kritis, yaitu pada nilai 0,05.

Asumsi dari model *fixed effect* dilihat dari parameter α . Efek individu yang tercermin dari parameter α mempunyai nilai tertentu yang tetap pada setiap individu namun setiap individu mempunyai parameter slope tetap. Adapun nilai α berbeda pada setiap individu, sedangkan β sama untuk semua individu. *Common effect* memiliki perbedaan dengan *random effect* model, perbedaan tersebut karena REM tidak menggunakan *Ordinary Least Square*, namun menggunakan *maximum likelihood* atau *general least square*. Apabila nilai *p-value* kurang dari batas kritis, yaitu 0,05 yang artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen apabila *p-value* lebih dari 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menentukan model estimasi regresi data panel, maka dilakukan pengolahan data dengan *common effect model (CEM)*, *fixed effect model (FEM)*, dan *random effect model (REM)*. Kemudian dalam menentukan model terbaik yang akan digunakan, dilakukan uji chow dan uji hausman. Pada Tabel 1 menunjukkan hasil dari pengolahan berbagai model :

Tabel 1. Pendekatan *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
PAD?	0.231993	0.049747	4.663414	0.0001
DAU?	0.289148	0.054283	5.326644	0.0000
DAK?	0.200760	0.110066	1.823991	0.0778
JP?	-126.0616	45.57108	-2.766263	0.0095
R-Squared		0.771258		
Adjusted R-Squared		0.749121		

Dari model *common effect* tersebut, diketahui bahwa R-Squared sebesar 0.771258 yang berarti variabel penelitian yang digunakan memiliki pengaruh terhadap belanja modal sebesar 77.1258 persen dan sisanya 22.8742 atau sebesar 2287.42 persen tidak dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2. Pendekatan *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	-5.89E+08	1.93E+08	-3.053425	0.0052
PAD?	0.490306	0.095667	5.125109	0.0000
DAU?	0.216054	0.115484	1.870860	0.0727

DAK?	0.052335	0.091282	0.573339	0.5713
JP?	669.3393	309.0332	2.165914	0.0397
Fixed Effect (Cross)				
_BANTUL—C	-1.35E+08			
_KULONPROGO—C	2.86E+08			
_YOGYA—C	1.67E+08			
_GUNUNGKIDUL--C	56628573			
_SLEMAN—C	-3.75E+08			
R-Squared		0.905153		
Adjusted R-Squared		0.875969		

Dari model *fixed effect* tersebut, diketahui bahwa R-Squared sebesar 0.905153 yang berarti variabel penelitian yang digunakan memiliki pengaruh terhadap belanja modal sebesar 90.515 persen dan sisanya 0.094847 atau sebesar 9.487 persen tidak dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3. Pendekatan *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	-1.31E+08	30948014	-4.243330	0.0002
PAD?	0.211698	0.035304	5.996407	0.0000
DAU?	0.534040	0.069192	7.718254	0.0000
DAK?	0.046544	0.085499	0.544373	0.5902
JP?	-179.3423	34.41463	-5.211223	0.0000
Random Effect (Cross)				
_BANTUL—C	1.74E-05			
_KULONPROGO—C	2.98-05			
_YOGYA—C	-2.08E-05			
_GUNUNGKIDUL--C	-1.83E-05			
_SLEMAN—C	-8.00-06			
R-Squared		0.836943		
Adjusted R-Squared		0.815202		

Hasil *random effect* menunjukkan bahwa R-Squared sebesar 0.836943 yang berarti variabel yang mempengaruhi belanja modal adalah variabel penelitian yang digunakan, dimana nilai pengaruh tersebut sebesar 83.6943 persen dan sisanya tidak dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini sebesar 16.3057 atau sebesar 1630.57 persen.

Tabel 4. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	4.674517	(4,26)	0.0056
Cross-section Chi-Square	18.964181	4	0.0008

Tujuan dilakukan Uji Chow adalah untuk menetapkan model yang digunakan, apakah *common effect* atau *fixed effect*. H0 : *Common effect*. H1 : *Fixed effect*. Membandingkan f-statistik dengan f-tabel. f-hitung > f-tabel : H0 ditolak. f-hitung < f-tabel : H0 diterima.

Diketahui f hitung = 4,674517. f -tabel = 2,74. f -tabel 2,74 diperoleh dari df (4,26), α = 5%. Jadi, f -hitung > f -tabel, maka H_0 ditolak yang berarti model yang digunakan *fixed effect*.

Tabel 5. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-section random	18.698068	4	0.0009

Tujuan dilakukan Uji Hausman adalah untuk menetapkan model yang akan digunakan, apakah *fixed effect* atau *random effect*. H_0 : *Random Effect Model*. H_1 : *Fixed Effect Model*
Chi-square statistic > *chi*-tabel maka menolak H_0 , *chi-square* statistic < *chi*-tabel maka menerima H_0 . Diketahui *Chi-square* statistik = 18,698068. *Chi*-tabel = 9,48. *Chi*-tabel 9,48 diperoleh dari df (4), α = 5%. Hasil ini menunjukkan nilai *chi-square* statistik > *chi*-tabel, oleh karena itu H_0 ditolak, artinya model terbaik yang digunakan adalah *fixed effect*. Dari pengujian Uji Chow dan Uji Hausman, maka diperoleh hasil yang digunakan yaitu model *fixed effect* dengan variabel yang signifikan yaitu Pendapatan Asli Daerah dan jumlah penduduk.

Tabel 6 Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	-5.89E+08	1.93E+08	-3.053425	0.0052
PAD?	0.490306	0.095667	5.125109	0.0000
DAU?	0.216054	0.115484	1.870860	0.0727
DAK?	0.052335	0.091282	0.573339	0.5713
JP?	669.3393	309.0332	2.165914	0.0397
Fixed Effect (Cross)				
_BANTUL—C	-1.35E+08			
_KULONPROGO--C	2.86E+08			
_YOGYA—C	1.67E+08			
_GUNUNGKIDUL--	56628573			
C				
_SLEMAN—C	-3.75E+08			

Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, untuk mengetahui variabel apa saja yang signifikan maka dilakukan dengan melihat nilai t -hitung dan nilai t -tabel dan probabilitas dari masing-masing variabel independen. Membandingkan nilai t -hitung dan nilai t -tabel. Apabila t -hitung > t -tabel maka dikatakan signifikan. Perhitungan t -tabel sebagai berikut : $df = n-k$, α . $df = 35-5$, 5%. $df = 30$, 5%. $df = 1.645$

Dengan melihat dari hasil perbandingan nilai t -hitung dengan nilai t -tabel, maka variabel yang signifikan yaitu variabel PAD, DAU dan Jumlah Penduduk. Membandingkan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas < 0.05 maka dikatakan signifikan. Berdasarkan hasil olahan tersebut, maka variabel yang signifikan adalah variabel Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan jumlah penduduk (JP). Dengan melakukan perbandingan t.hitung dengan t.tabel dan membandingkan nilai probabilitas, maka variabel yang signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk (JP). Hasil pengolahan menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu belanja modal tertinggi ada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebesar $2.86E+08$ atau 0,00000286. Sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Sleman, yaitu sebesar $-3.75+08$ atau 0,00000375.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pada tahun 2011-2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (BM). Hasil tersebut tercermin dari nilai t-hitung yang lebih besar dibandingkan nilai t-tabel yaitu $5.125109 > 1.64$ sedangkan jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu $0.0000 < 0.05$. Nilai t-hitung untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 1.870860 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1.645, dimana nilai t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel, hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap Belanja Modal (BM) di DIY tahun 2011-2017 dengan nilai probabilitas $0.0727 > 0.05$. Hasil yang sama ditunjukkan oleh hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM) di DIY tahun 2011-2017. Dimana nilai t-hitung sebesar 0.573339 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1.645 dengan nilai probabilitas $0.5713 > 0.05$ yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Sementara hubungan antara variabel jumlah penduduk (JP) dengan Belanja Modal (BM) di DIY tahun 2011-2017 menunjukkan hasil signifikan. Dengan nilai t-hitung 2.165914 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1.645. Nilai probabilitas $0.0397 < 0.05$.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dengan adanya pengaruh yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Belanja Modal, dimana semakin besar Pendapatan Asli Daerah, akan berbanding dengan semakin besar Belanja Modal. Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah harus mengupayakan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus-menerus. Misalnya dengan cara mengefektifkan pajak, retribusi, meningkatkan penyuluhan pajak, pengawasan serta pelayanan pajak. Jumlah penduduk memiliki pengaruh pada Belanja Modal yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka belanja modal semakin besar. Sehingga diharapkan untuk Pemerintah mampu meningkatkan kualitas manusia, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Akan tetapi jumlah penduduk merupakan suatu konsekuensi, jika jumlah penduduk semakin banyak dapat ditekan dengan program Keluarga Berencana (KB).

DAFTAR RUJUKAN

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2).
- Askam, T. (2008). PENGARUH DAU, DAK, PAD, DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2).
- Boediono. (1999). Seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi no. 2 : Ekonomi Makro. In *BPFE*.
- Boediono. (2014). Seri Sinopsis Pengantar Ilmu EKonomi. *BPFE*.
- Devita Andri, Arman Delis, Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 2 (2).
- Dinar, & Hasan. (2018). Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi. In *CV. Nur Lina* (Issue 1980).
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. In *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI BALI. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3).
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). PP Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- M. Suparmoko. (2002). Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. In *Monograf*.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Pelealu, A. (2013). PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2003-2012. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2892>

- Republik Indonesia. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen IV). *Wikisource Bahasa Indonesia, Perubahan IV*.
- RI, D. (1999). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. *UU No. 22 1999, 1*.
- Todaro, M. P. (2008). Pembangunan Ekonomi (Jilid 1) (Edisi 9). In *Edisi Kesembilan terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji AL Jakarta: Erlangga*.